

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PARIAMAN **2017**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PARIAMAN**



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PARIAMAN **2017**

<https://pariamankota.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PARIAMAN 2017

ISBN : 978-602-1390-65-8

No. Publikasi : 13770.1813

Nomor Katalog : 4102004.1377

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm (A5)

Jumlah Halaman : xii + 92 halaman

Naskah: Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Penyunting: Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Kover oleh: Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Diterbitkan Oleh: © Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Dicetak Oleh: CV. Graphic Dwipa

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, dan atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

**TIM PENYUSUN PUBLIKASI INDIKATOR KESEJAHTERAAN
RAKYAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2017**

Pengarah : Ir. Muhamad Hudaya

Penanggung Jawab : Agusman Suria

Penyunting : 1. Tri Hayuni Syardi, SST
2. Ir. Muhammad Hudaya

Penyusun Naskah : Rina Ramli, SST

Ilustrasi : Rina Ramli, SST

Desain Cover : Rina Ramli, SST

Pelaksana Teknis : Rina Ramli, SST

<https://pariamankota.ms.p.i>

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman 2017 merupakan publikasi tahunan BPS Kota Pariaman yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Pariaman antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Pariaman, November 2018
Kepala BPS Kota Pariaman



Ir. Muhammad Hudaya

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	x
Singkatan dan Akronim	xii
Bab I Kependudukan	1
Bab II Kesehatan dan Gizi	17
Bab III Pendidikan	31
Bab IV Ketenagakerjaan	43
Bab V Taraf dan Pola Konsumsi	55
Bab VI Perumahan dan Lingkungan	65
Bab VII Kemiskinan	77
Bab VIII Sosial Lainnya	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pariaman, 2015-2017	3
Tabel 1.2	Tabel 1.2 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Pariaman Menurut Kecamatan, 2017	4
Tabel 1.3	Tabel 1.3 Jumlah, Persebaran, dan Kepadatan Penduduk Kota Pariaman Menurut Kecamatan, 2017	7
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Kota Pariaman Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan (persen), 2013-2017	9
Tabel 1.5	Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB Atau Cara Tradisional Untuk Menunda Atau Mencegah Kehamilan Kota Pariaman, 201-2017	14
Tabel 2.1	Beberapa Indikator Kesehatan Kota Pariaman, 2016-2017	21
Tabel 2.2	Beberapa Indikator Kesehatan Kota Pariaman, 2016-2017	24
Tabel 2.3	Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Kota Pariaman, 2016-2017	27
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat (Persen)	28

	Kota Pariaman, 2016-2017	
Tabel 2.5	Penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan (Persen) Kota Pariaman, 2016-2017	30
Tabel 3.1	Angka Melek Huruf dan rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin Kota Pariaman, 2016-2017	35
Tabel 3.2	Angka Melek Huruf dan rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2016-2017	39
Tabel 3.2	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas (Persen) Kota Pariaman, 2017	41
Tabel 4.1	Tingkat Parsipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kota Pariaman, 2014 – 2016	47
Tabel 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Kota Pariaman, 2016-2017	49
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Kategori Lapangan Usaha (Persen) Kota Pariaman, 2014-2016	50
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Kota Pariaman, Tahun 2015	54

	dan 2017	
Tabel 5.1	Perkembangan Pengeluaran Rata-rata Perkapita/Bulan Kota Pariaman, 2016-2017	59
Tabel 5.2	Rata-rata Pengeluaran untuk Makanan dan Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita (Rupiah) Kota Pariaman, 2017	61
Tabel 5.3	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Kota Pariaman, 2015-2017	63
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Perumahan Kota Pariaman, 2016-2017	68
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan Kota Pariaman, 2016-2017	71
Tabel 7.1	Perkembangan Penduduk Miskin Kota Pariaman 2016-2017	79
Tabel 7.2	Beberapa Indikator Penduduk Miskin Kota Pariaman 2016-2017	80
Tabel 8.1	Indikator Sosial Lainnya Kota Pariaman, 2016-2017	86
Tabel 8.2	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi Menurut Alat Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman, 2016-2017	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perbandingan Persentase Luas Wilayah dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Persen) Kota Pariaman, 2017	6
Gambar 1.2	Gambar 1.2 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pariaman, 2011-2017	10
Gambar 1.3	Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama (persen) Kota Pariaman, 2016-2017	13
Gambar 1.4	Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan Kota Pariaman, 2016-2017	16
Gambar 2.1	Umur Harapan Hidup Kota Pariaman, 2014-2017	22
Gambar 3.1	Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman Tahun 2013-2017	37
Gambar 4.1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas Menurut Lapangan Usaha Kota Pariaman, 2015 dan 2017	51
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Bekerja Kurang	53

dari 35 Jam Kota Pariaman, Tahun
2015 dan 2017

Gambar 6.1 Status Kepemilikan Rumah Kota 74
Pariaman (Persen), 2017 Kota
Pariaman

<https://pariamankota.bps.go.id>

SINGKATAN DAN AKRONIM

APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
<i>ASFR</i>	<i>Age specific Fertility Rate</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
<i>SDGs</i>	<i>Sustainable Development Goals</i>
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UKBM	Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
AMH	Angka Melek Huruf
APK	Angka Partisipasi Kasar
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
TSP	Tingkat Setengah Pengangguran
GK	Garis Kemiskinan
ART	Anggota Rumah Tangga
KRT	Kepala Rumah Tangga

BAB I

KEPENDUDUKAN



Angka Ketergantungan Kota Pariaman Tahun 2017
adalah sebesar 56,31 persen

KEPENDUDUKAN

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2017 tercatat 86.618 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2016 (85.691 jiwa) dengan laju pertumbuhan 1,08 persen per tahun. Laju pertumbuhan menunjukkan angka positif namun terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 1,16 di tahun 2016 menjadi 1,08 persen di tahun 2017.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pariaman, 2015-2017

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)
2015	84.709	-
2016	85.691	1,16
2017	86.618	1.08

Sumber: Proyeksi Penduduk SP2010

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu

dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.

Rasio jenis kelamin Kota Pariaman tahun 2017 sebesar 97,55 artinya secara rata-rata dalam setiap seratus orang penduduk wanita akan terdapat 97 hingga 98 penduduk laki-laki.

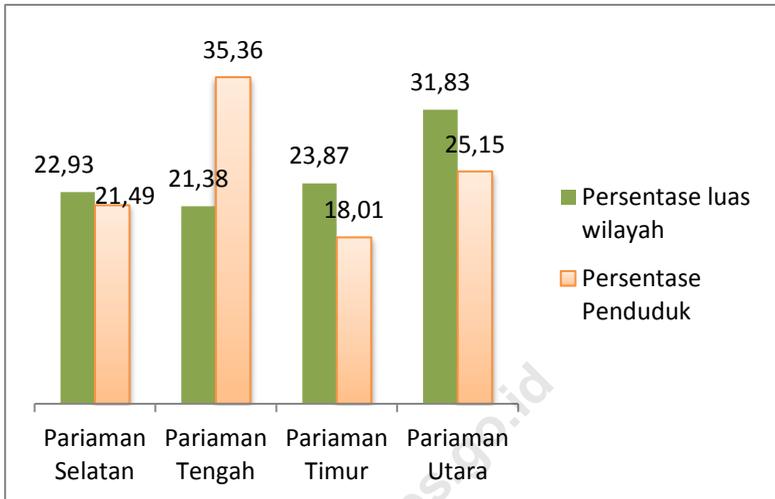
Tabel 1.2 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Pariaman Menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki- laki	Wanita	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pariaman Selatan	9.152	9.458	18.810	96,76
Pariaman Tengah	15.295	15.333	30.628	99,75
Pariaman Timur	7.682	7.914	15.596	97,07
Pariaman Utara	10.642	11.142	21.784	95,51
Kota Pariaman	42.771	43.847	86.618	97,55

Sumber: Proyeksi Penduduk SP2010

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu permasalahan yang dihadapi dengan meningkatnya jumlah penduduk yaitu masalah persebaran penduduk yang tidak merata sehingga berdampak pada masalah sosial ekonomi lainnya. Konsentrasi penduduk yang tinggi pada suatu wilayah di satu sisi dapat memudahkan dalam pelayanan sosial, namun jika telah melebihi kapasitas lingkungan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat meningkatkan kerawanan sosial jika tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi pula. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk di Kota Pariaman pada tahun 2017 relatif cukup padat jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah Kota Pariaman sebesar 73,36 kilo meter persegi dan jumlah penduduk di tahun 2017 sebesar 86.618 jiwa, berarti secara rata-rata kepadatan penduduk di Kota Pariaman sebesar 1.180 jiwa per kilo meter persegi.



Gambar 1.1 Perbandingan Persentase Luas Wilayah dan Persentase Jumlah Penduduk Kota Pariaman Menurut Kecamatan (Persen), 2017

Kenyataannya kepadatan penduduk di Kota Pariaman belum merata. Beberapa kecamatan dengan luas wilayah yang besar, jumlah penduduknya cukup rendah seperti Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Timur. Kecamatan Pariaman Tengah berada dalam kondisi yang sebaliknya, dengan luas wilayah yang paling kecil jumlah penduduknya menjadi yang terbesar. Hal ini disebabkan Kecamatan Pariaman Tengah merupakan ibukota Pariaman dan sekaligus menjadi pusat pemukiman dan perekonomian.

Tabel 1.3 Jumlah, Persebaran, dan Kepadatan Penduduk Kota Pariaman Menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persebaran Penduduk	Kepadatan penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Pariaman Selatan	18 610	21,49	1 106
Pariaman Tengah	30 628	35,36	1 953
Pariaman Timur	15 596	18,01	890
Pariaman Utara	21 784	25,15	932
Kota Pariaman	86 618	100,00	1 180

Sumber: Proyeksi Penduduk SP2010

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pariaman Tengah, kemudian diikuti oleh Kecamatan Pariaman Selatan. Pariaman Tengah merupakan pusat kota/pemerintahan, sedangkan Pariaman Selatan juga memiliki berbagai macam fasilitas dan merupakan wilayah lintas kabupaten/kota. Sedangkan, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pariaman Timur. Terdapat kecenderungan penduduk perkotaan kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi, sedangkan daerah perdesaan kepadatan lebih rendah.

Angka Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan banyak hal diantaranya tingkat produktifitas penduduk serta tingkat konsumsi penduduk. Dilihat dari sisi konsumsi, penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun membutuhkan pelayanan sosial dan fasilitas umum yang lebih besar seperti pelayanan kesehatan serta pendidikan. Dari sisi produktifitas, penduduk pada kelompok umur tersebut masih rendah, sehingga secara umum tingkat konsumsi akan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi yang mampu dihasilkan. Begitu pula dengan penduduk yang ada pada kelompok umur diatas 65 tahun, dengan produktifitas yang secara umum mulai menurun, mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Sebaliknya untuk penduduk pada kelompok usia 15-64 tahun yang produktifitasnya secara rata-rata akan lebih tinggi dibandingkan konsumsinya, sehingga semakin besar jumlah penduduk pada kelompok umur ini relatif terhadap kelompok umur lainnya, berpeluang untuk meningkatkan produktivitas di suatu wilayah.

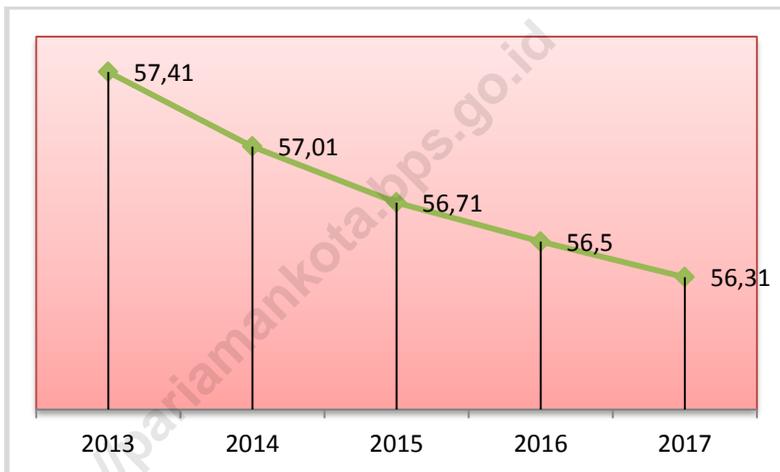
Tabel 1.4 Persentase Penduduk Kota Pariaman Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan (persen), 2013-2017

Tahun	Kelompok Umur (Tahun)			Rasio Ketergantungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	30,29	63,53	6,18	57,41
2014	30,11	63,69	6,20	57,01
2015	29,93	63,81	6,26	56,71
2016	29,75	63,90	6,35	56,50
2017	29,54	63,98	6,48	56,31

Sumber: Proyeksi Penduduk SP2010

Proporsi penduduk umur produktif di Kota Pariaman merupakan yang terbesar dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 komposisi penduduk usia produktif sebesar 63,53 persen dan meningkat menjadi 63,98 persen di tahun 2017. Sementara komposisi usia 0-14 tahun menurun 30,29 persen menjadi 29,54 persen. Namun hal sebaliknya terjadi pada komposisi penduduk usia 65 tahun keatas mengalami

peningkatan dari 6,18 persen menjadi 6,48 persen. Hal inilah yang menyebabkan angka beban ketergantungan penduduk Kota Pariaman terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2013 angka beban ketergantungan sebesar 57,41 persen dan menurun menjadi 56,31 persen pada tahun 2017.



Gambar 1.2 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pariaman, 2011-2017

Angka beban ketergantungan pada tahun 2017 sebesar 56,31 berarti setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 56 orang penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Menurunnya angka beban ketergantungan juga dapat menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif yang semakin meningkat relatif

terhadap jumlah penduduk yang tidak produktif. Jika kecenderungan penurunan angka beban ketergantungan terus berlangsung, maka diharapkan Indonesia akan segera mencapai fase ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah (*windows of opportunity*).

Angka beban ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi yaitu angka ketergantungan di bawah 50 yang berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1-2 orang penduduk produktif. Seperti diketahui bahwa bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Indonesia adalah usia angkatan kerja 15-64 tahun, dimana penduduk pada kelompok ini menjadi potensial bagi Indonesia untuk menjadi negara maju apabila sumber daya manusianya berkualitas. Sebaliknya, akan menjadi bumerang jika kualitas sumber daya manusia penduduk produktif itu rendah (Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035).

Perkawinan

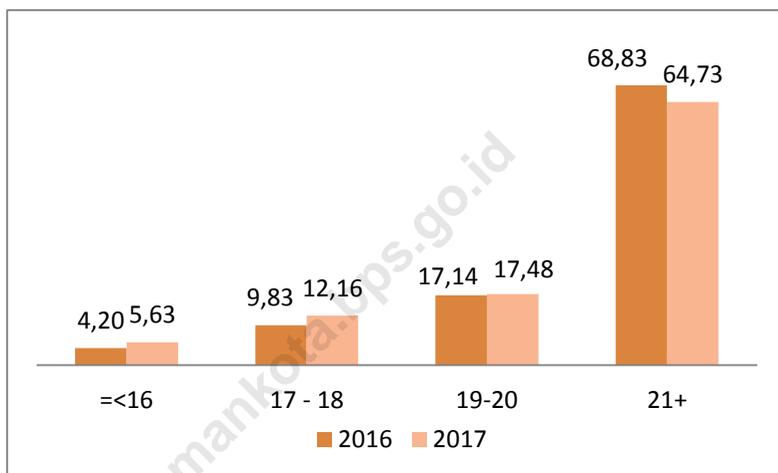
Salah satu yang dapat memicu penambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah.

Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, persentase wanita Kota Pariaman berusia 10-15 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebesar 5,63 persen atau mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,20 persen. Sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas dan persentasenya terus menurun, dari 68,83 persen pada tahun 2016 turun menjadi 64,73 persen pada tahun 2017.

sementara itu, wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 17-18 tahun masih cukup tinggi yaitu tahun 2016 mencapai 9,83 persen dan tahun 2017 menjadi 12,16 persen.



Gambar 1.3 Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama (persen) Kota Pariaman, 2016-2017

Sumber: Susenas, 2016-2017

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

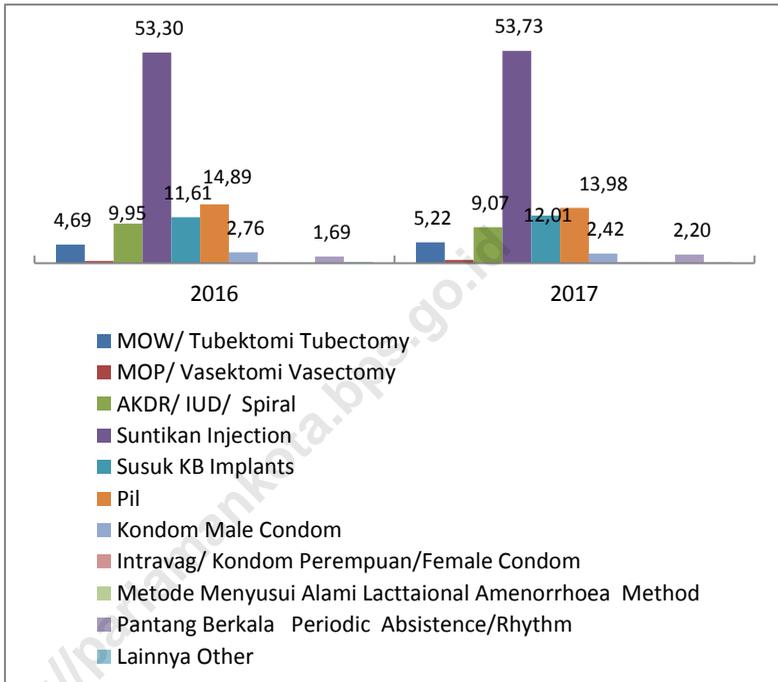
Tabel 1.5 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB Atau Cara Tradisional Untuk Menunda Atau Mencegah Kehamilan Kota Pariaman, 2016-2017

Pernah/Tidak Memakai Alat KB	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Pernah	21,37	15,66
Sedang	30,45	37,49
Tidak pernah menggunakan	48,18	46,84

Sumber: Susenas, 2016-2017

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016-2017, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sebesar 30,45 persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 37,49 persen pada tahun 2017. Grafik memperlihatkan

bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati.



Gambar 1.4 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun Kota Pariaman yang Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan, 2016-2017

Pada tahun 2016 penggunaan suntikan mencapai 53,30 persen dan meningkat menjadi 53,73 persen pada tahun 2017, sedangkan penggunaan pil mengalami penurunan dari 14,89 persen pada tahun 2016 menjadi

13,98 persen pada tahun 2017. Pemakaian MOW/Tubektomi di Kota Pariaman juga cukup signifikan yaitu 4,69 persen di tahun 2016 meningkat menjadi 5,22 persen di tahun 2017. Sementara pemakaian MOP/Vasektomi Kondom/ karet, dan Intravag/tisue /kondom wanita hanya berada di bawah satu persen.

<https://pariamankota.bps.go.id>

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

<https://pariamankota.bps.go.id>



**Rata-rata bayi usia 0-23 bulan di Kota Pariaman
disusui selama 10 bulan**

KESEHATAN DAN GIZI

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi masyarakat di suatu daerah, akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diantaranya dengan memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang

mengakibatkan terganggunya aktivitas bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Tabel 2.1 Beberapa Indikator Kesehatan Kota Pariaman, 2016-2017

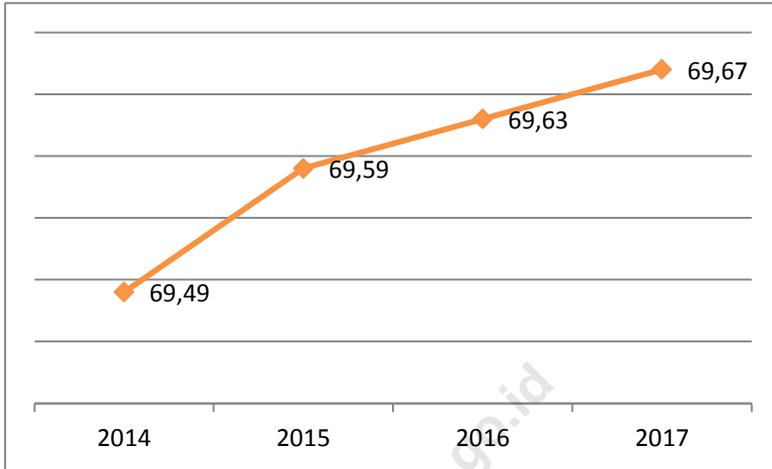
Indikator	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Angka Kesakitan (%)	38,91	28,81
Rata-rata lama sakit (hari)	5,57	5,97

Sumber Susenas 2016-2017

Hasil Susenas tahun 2017 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kota Pariaman mencapai 28,81 persen, atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 38,91 persen.

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Menurunnya angka morbiditas pada tahun 2017 tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan penduduk yang meningkat, namun sebaliknya terjadi peningkatan rata-rata lama sakit penduduk dari 5,57 hari di tahun 2016 menjadi 5,97 hari di tahun 2017. Hasil Susenas tahun 2016 dan 2017 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 5 hari. Semakin lamanya kesakitan, maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat memengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

Umur harapan hidup umur nol penduduk Kota Pariaman terus mengalami peningkatan dari 69,49 di tahun 2014 menjadi 69,67 di tahun 2017. Ini berarti bahwa secara rata-rata bayi yang dilahirkan pada tahun 2017 dapat hidup selama 69,67 tahun. Meningkatnya angka harapan hidup penduduk mengindikasikan semakin baiknya taraf kesehatan penduduk.



Gambar 2.1 Umur Harapan Hidup Kota Pariaman, 2014-2017

Tingkat Imunisasi dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal bagi seorang anak. Setelah sang anak lahir, pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas

tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas 2016-2017, menunjukkan bahwa dari anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui sudah mencapai hampir 100 persen, namun pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 98,59 persen.

Dianjurkan seorang ibu dapat menyusui bayinya selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan/proteksi yang lebih kuat. Bila dilihat rata-rata lama bayi disusui pada tahun 2016 dan 2017 sama yaitu sekitar 10 bulan.

**Tabel 2.2 Beberapa Indikator Kesehatan Kota Pariaman,
2016-2017**

Indikator	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Anak usia 0-23 bulan		
Anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui (%)	100,00	98,59
Rata-rata lama disusui (hari)	10,27	10,32
Imunisasi pada anak umur 12-59 bulan		
BCG	83,35	90,91
DPT	79,71	85,49
Polio	87,62	90,45
Campak/Measless	56,60	67,27
Hepatitis B	82,57	79,83

Sumber: Susenas 2016-2017

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik

atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir berdasarkan hasil Susenas 2016-2017, rata-rata balita yang pernah mendapatkan imunisasi wajib sudah mencapai lebih dari 85 persen. Namun, pada balita yang mendapatkan imunisasi campak masih di bawah 80 persen yaitu sebesar 56,60 persen di tahun 2016 namun meningkat di tahun 2017 menjadi 67,27 persen.

Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga

medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Salah satu programnya meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat sudah mencapai 100 persen artinya hampir tidak ditemukan penolong persalinan oleh tenaga dukun bayi di Kota Pariaman.

**Tabel 2.3 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan
Kota Pariaman, 2016-2017**

Indikator	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Persentase balita menurut penolong persalinan		
<u>Tenaga Kesehatan</u>		
Dokter	49,70	43,10
Bidan	50,30	53,21
Lainnya	0,00	3,69
<u>Bkan Tenaga Kesehatan</u>		
Dukun Tradisional	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber Susenas 2016-2017

Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk yang berobat ke fasilitas praktek dokter/klinik pada tahun 2016 sebesar 54,92 persen meningkat menjadi 55,12 persen di tahun 2017 dan begitu juga dengan masyarakat yang berobat ke puskesmas meningkat dari 30,51 persen di tahun 2016 menjadi 34,95 persen di tahun 2017. Dan sebaliknya terjadi penurunan penduduk yang memanfaatkan berobat ke UKBM (Poskesdes, Polindes,

Posyandu dan Balai Pengobatan) dari 7,26 persen di tahun 2016 menjadi 3,65 persen di tahun 2017.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat (Persen) Kota Pariaman, 2016-2017

Indikator	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Persentase penduduk yang berobat jalan	69,54	59,67
Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat		
Rumah sakit	12,71	13,73
Praktek Dokter/klinik	54,92	55,12
Puskesmas	30,51	34,95
UKBM	7,26	3,65
Praktek Pengobatan Tradisional	1,35	2,59
Dukun Bersalin/Lainnya	1,14	0,00

Sumber Susenas 2016-2017

Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya.

Terjadinya pergeseran secara tidak langsung menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan yang sekaligus menjadi indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah bahkan negara.

Pemilikan jaminan kesehatan sangat diperlukan agar penduduk tidak mengalami kendala dalam mengakses fasilitas kesehatan, terutama kendala yang berkaitan dengan kendala biaya. Sejak tahun 2011 pemerintah Kota Pariaman telah memberikan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JKSS) bagi masyarakat yang tidak mendapatkan Jamkesmas. Dengan demikian pemerataan jaminan kesehatan di Kota Pariaman telah didapat oleh masyarakat. Namun tidak semua masyarakat Kota Pariaman yang memanfaatkan jaminan kesehatan yang dimiliki

Dari tabel 2.5 terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk menggunakan jaminan kesehatan masih cukup tinggi bahwa meningkat dari 55,56 persen di tahun 2016 menjadi 65,76 persen di tahun 2017. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya layanan jamkesda Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang disebut juga dengan JKSS (Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang) yang membantu

masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan berobat jalan ke tempat pelayanan kesehatan medis.

Tabel 2.5 Penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan (Persen) Kota Pariaman, 2016-2017

Indikator	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan	55,56	65,76
Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan menurut jenis jaminan		
BPJS Kesehatan	NA	23,25
BPJS Non PBI	NA	19,45
Jamkesda	NA	22,34
Asuransi Swasta	NA	0,72
Perusahaan/kantor	NA	0,00

Sumber: Susenas, 2016-2017

BAB III

PENDIDIKAN

<https://pariamankota.bps.go.id>



Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pariaman adalah 10 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA

PENDIDIKAN

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dan kompetensi dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Pada tahun-tahun mendatang pembangunan pendidikan nasional akan terus dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup :

1. Pemerataan dan perluasan akses,
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,
3. Penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik,
4. Peningkatan pembiayaan.

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (*literacy rate*). Kata “melek

huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya serta mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang bisa baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf dan rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin Kota Pariaman, 2016-2017

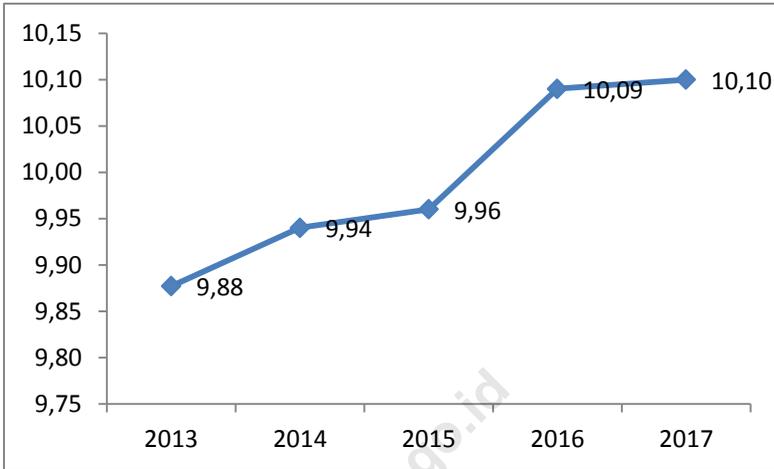
Indikator	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Angka Meleh Huruf (AMH)		
Laki-laki	99,72	100,00
Perempuan	99,08	98,25
Laki-laki+Perempuan	99,43	99,16
Rata-rata lama Sekolah	10,09	10,10

Angka melek huruf dirasakan sudah jenuh untuk menggambarkan perkembangan tingkat pendidikan penduduk. Jika ada penduduk yang buta huruf pada

umumnya berasal dari kelompok umur tua, sehingga sulit untuk mengupayakan agar penduduk tersebut dapat membaca atau menulis. Oleh karena itu diperlukan indikator lainnya yang menggambarkan perkembangan tingkat pendidikan penduduk seperti rata-rata lama sekolah atau angka partisipasi sekolah.

Rata-rata lama sekolah merupakan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Peningkatan rata-rata lama sekolah mengindikasikan perbaikan tingkat pendidikan penduduk.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pariaman secara umum mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2017. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Pariaman yaitu 9,88 tahun yang setara dengan kelas tiga SMP. Dalam kurun 5 (lima) tahun kemudian, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pariaman meningkat menjadi 10,10 tahun di tahun 2017 atau setara dengan kelas 1 SMA.



Gambar 3.1 Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman Tahun 2013-2017

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni

Tujuan dari *Millenium Development Goals (MDGs)* diantaranya adalah menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (*primary schooling*). Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam hal ini yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS). Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan

berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Penduduk usia 7-12 tahun yang sudah mengenyam bangku pendidikan mencapai 100 persen baik laki-laki maupun perempuan. Pada kelompok usia berikutnya APS semakin menurun yaitu usia 13-15 APS sebesar 96,70 persen atau masih ada 3,30 persen penduduk usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan, dan begitu juga usia 16-18 tahun APS hanya sebesar 89,81 persen, atau terdapat sebesar 10,19 persen penduduk usia 16 – 18 tahun di Kota Pariaman belum pernah sekolah.

Pada Tabel 3.2 terlihat bahwa APS penduduk laki-laki dan perempuan pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok, dimana APS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berarti persentase perempuan yang mengenyam bangku pendidikan lebih besar dibandingkan laki-laki di Kota Pariaman.

Tabel 3.2 Angka Melek Huruf dan rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin Kota Pariaman, 2016-2017

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
7 – 12 tahun	100,00	100,00	100,00
13 – 15 tahun	94,27	99,83	96,70
16 – 18 tahun	87,08	92,75	89,81
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD	100,00	100,00	100,00
SMP	70,81	73,80	72,11
SMA	64,11	79,00	71,28

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan, APM semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya partisipasi penduduk dalam melanjutkan jenjang pendidikannya.

Secara umum APM SD sudah mencapai 100 persen, yang artinya seluruh penduduk yang berusia 7-12 sedang mengenyam bangku Sekolah Dasar. Seperti halnya APS, semakin tinggi jenjang pendidikan APM juga semakin menurun. APM tingkat SMP sebesar 72,11 persen, menunjukkan penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMP sebesar 72,11 persen, dan APM tingkat SMA sebesar 71,28 persen. Hal yang menarik diperhatikan adalah APM laki-laki lebih rendah dibandingkan APM perempuan di tingkat pendidikan SMP dan SMA.

Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat kesejahteraan penduduk diharapkan semakin baik. Penduduk dengan tingkat pendidikan setara SMP berpeluang memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan penduduk yang berpendidikan SD atau dibawahnya. Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan SMP mencapai 72,27 persen. Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa persentase penduduk laki-laki yang

minimal menamatkan tingkat pendidikan setara SMP lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tabel 3.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas (Persen) Kota Pariaman, 2017

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Wanita	Laki-laki + wanita
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Mempunyai Ijazah	10,74	14,80	12,84
Tamat SD Sederajat	17,28	10,78	13,92
Tamat SMP Sederajat	22,46	21,58	22,00
Tamat SMA Sederajat	30,28	28,11	29,16
SMK	8,11	4,95	6,48
Dipoma I dan II	0,2	1,23	0,76
Diploma III	2,57	3,31	2,95
Diploma IV/S1/S2/S3	8,30	15,25	11,89
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas, 2017

Dilihat menurut pendidikan tertinggi yang pernah di tamatkan, sebagian besar penduduk Kota Pariaman memiliki pendidikan setara SMA/SMK dengan persentase mencapai 35,64 persen. Persentase penduduk yang menamatkan perguruan tinggi masih relatif kecil, yaitu

hanya sebesar 11,89 persen. Sementara itu, penduduk yang tidak memiliki ijazah masih tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 12,84 persen.

Jika dibanding menurut jenis kelamin terlihat persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah tertinggi SMA/ sederajat ke bawah lebih tinggi dari pada perempuan, namun memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Diploma ke atas) persentase perempuan yang memilikinya lebih besar dibandingkan laki-laki.

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

<https://pariamankota.bps.go.id>



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pariaman
Tahun 2017 adalah sebesar 5,97 persen

KETENAGAKERJAAN

Persoalan ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta persoalan pekerja anak.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha, persentase pekerja menurut

kelompok upah/gaji/pendapatan bersih dan persentase pekerja anak.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dan digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian hasil pembangunan. Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. Nilai TPAK yang terus menurun menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin sedikit.

TPAK mengalami penurunan dari 77,44 persen pada 2015 menjadi 76,15 persen pada 2017 kondisi Agustus. Penurunan TPAK ini merupakan indikasi menurunnya kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan pengaruh dari pilihan perempuan untuk mengurus rumah tangga.

Tabel 4.1 Tingkat Parsipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kota Pariaman, 2015 – 2017

Uraian	2015	2017
(1)	(2)	(3)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
Laki-laki	77,44	76,15
Perempuan	53,31	54,94
Laki-laki+Perempuan	64,95	65,20
Tingkat Pengangguran Terbuka		
Laki-laki	4,76	6,26
Perempuan	9,10	5,58
Laki-laki+Perempuan	6,61	5,97

Sumber: Sakernas 2015 dan 2017

Tingkat pengangguran terbuka Kota Pariaman tahun 2017 sebesar 5,97 persen atau lebih rendah jika dibandingkan di tahun 2015 (6,61 persen). Menurunnya TPT tahun 2017 menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia dinilai cukup mampu menyerap jumlah tenaga kerja. Hal ini terkait dengan ketersediaan jumlah lapangan kerja dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pendidikan

Harapan setiap orang adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit pula dari para lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan mereka.

Secara umum pada tabel 4.2 terlihat bahwa persentase penduduk yang menganggur paling besar pada jenjang pendidikan SMA ke atas, khususnya pada jenjang pendidikan Diploma dan Universitas (pengangguran terdidik). Pemerintah masih harus membuat terobosan baru untuk menekan bertambahnya jumlah pengangguran terdidik terutama dalam pengembangan bidang kewirausahaan.

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Kota Pariaman, 2016-2017

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya ijazah SD	0,99	40,58	1,24
SD/MI	0,00	0,00	0,00
SMP/Tsanawiyah	0,00	0,00	0,00
SMA/Aliyah	12,89	2,94	8,47
SMK	3,56	6,53	4,52
Diploma I/II/III	0,00	26,17	18,58
Universitas/S1/S2/S3	15,54	7,67	10,85
Total	6,26	5,58	5,97

Lapangan Usaha

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dikelompokkan menjadi 3 kategori lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), Industri (pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan/konstruksi), dan Jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan,

komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Kategori Lapangan Usaha (Persen) Kota Pariaman, 2014-2016

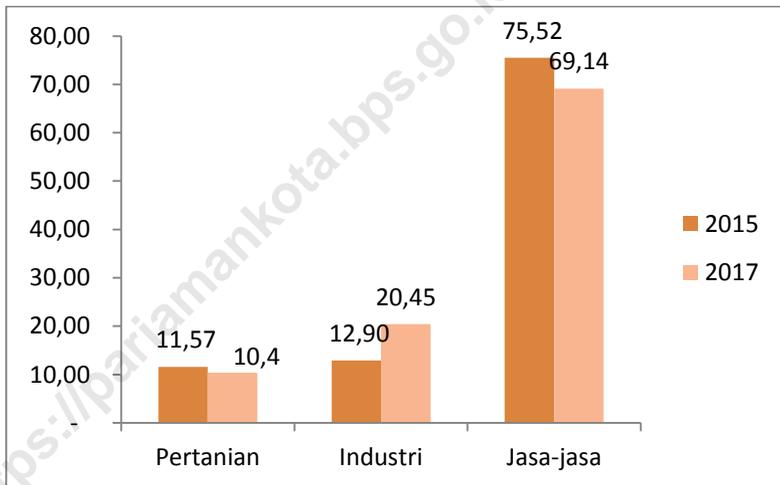
Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	14,88	4,62	10,40
Industri	21,51	19,10	20,45
Jasa-jasa	63,61	76,28	69,14
Total	100,00	100,00	100,00

Catatan:

- Cakupan kategori usaha Pertanian (A) adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- Cakupan kategori usaha Industri (M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air; serta Bangunan
- Cakupan kategori usaha Jasa-Jasa (S) adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan

Secara umum penduduk Kota Pariaman yang bekerja mayoritas berada pada kelompok kategori

lapangan usaha jasa sebesar 69,14 persen, diikuti industri (20,45 persen), baru pertanian (10,40 persen). Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang bekerja di sektor jasa lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan pada sektor pertanian dan industri, persentase laki-laki lebih tinggi disebabkan jenis pekerjaan pada sektor ini membutuhkan kekuatan fisik.



Gambar 4.1 Persentase penduduk 15 tahun ke atas Menurut Lapangan Usaha Kota Pariaman, 2015 dan 2017

Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan dari 11,57 persen di tahun 2015 menjadi 10,40 persen di tahun 2017. Hal ini terkait dengan luas areal pertanian di Kota Pariaman relatif sempit sehingga penduduk lebih banyak bekerja di luar sektor

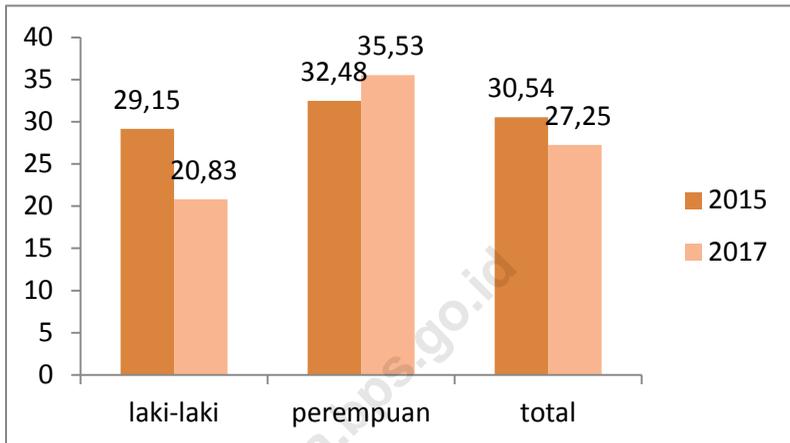
pertanian. Sedangkan lapangan usaha yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota Pariaman adalah sektor industri yaitu meningkat dari 12,90 persen di tahun 2015 menjadi 20,45 persen di tahun 2017.

Jumlah Jam Kerja

Fokus ketenagakerjaan tidak hanya pada besarnya angka pengangguran tetapi juga pada produktivitas tenaga kerja melalui jumlah jam kerja. Asumsi yang berlaku adalah semakin banyak jam kerja maka pekerja akan semakin produktif. Konsep jumlah jam kerja yang digunakan adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan (tidak termasuk jam istirahat dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Bila pekerja bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

Pada Gambar 4.2 terlihat penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal adalah 30,54 persen tahun 2015 dan mengalami penurunan di tahun 2017 yaitu menjadi 27,5 persen. Sementara itu, penduduk yang

bekerja di atas 60 jam adalah 20,30 persen tahun 2015, naik menjadi 20,98 persen pada tahun 2017.



Gambar 4.2 Persentase Penduduk Bekerja Kurang dari 35 Jam Kota Pariaman, Tahun 2015 dan 2017

Dengan melihat jam kerja dapat diperoleh Tingkat Setengah Pengangguran (TSP). TSP dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal dengan jumlah angkatan kerja. Tingginya TSP mengindikasikan bahwa kurang optimalnya pemanfaatan tenaga kerja yang ada. Dari Tabel 4.4, TSP Kota Pariaman pada tahun 2015 adalah 28,03 persen dan tahun 2017 sedikit naik menjadi 28,22 persen.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Kota Pariaman, Tahun 2015 dan 2017

Jam Kerja	2015	2017
(1)	(2)	(3)
0*	5,90	3,55
1-9	2,62	5,67
10-24	13,67	13,86
25-34	10,96	10,49
35-44	22,07	24,87
45-59	24,48	20,57
60+	20,30	20,98
Jumlah	100,00	100,00

Keterangan: 0* Sementara tidak bekerja

Sumber: Sakernas 2015 dan 2017

BAB VI

PERUMAHAN & LINGKUNGAN



Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi penduduk juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga yang secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hal ini terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada

umumnya rendah, begitupula sebaliknya permintaan akan barang bukan makanan pada umumnya meningkat atau tinggi.

Dari segi budaya, pergeseran ini dikhawatirkan menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin menyukai hal-hal yang bersifat instan dan praktis. Selain itu, dari segi keamanan pangan, ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian. Makanan jadi banyak digemari karena kepraktisannya. Namun di sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan semakin tumbuhnya kekhawatiran akan tingginya resiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi.

Jumlah dan persentase penduduk miskin adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan pendapatan penduduk yang meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin memberi indikasi menurunnya pendapatan penduduk.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran

rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 5.1 Perkembangan Pengeluaran Rata-rata Perkapita/Bulan Kota Pariaman, 2016-2017

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)		(%)	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	617.716	676.192	53,57	55,47
Bukan Makanan	535.438	542.766	46,43	44,53
Perumahan	207.511	212.231	18,00	17,41
Barang dan Jasa	88.814	63.707	7,70	5,23
Pakaian	52.800	51.420	4,58	4,22
Barang Tahan Lama	92.854	64.067	8,05	5,26
Lainnya	97.459	151.341	8,45	12,42
Jumlah	1.153.154	1.218.958	100,00	100,00

Sumber: Susenas, 2016-2017

Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2016-2017 penduduk meningkat dari Rp 1.153.154,- menjadi Rp. 1.218.958,-. Persentase pengeluaran untuk makanan memperlihatkan adanya peningkatan yaitu dari 53,57 persen menjadi 55,47 persen pada tahun 2017. Dan sebaliknya persentase untuk

pengeluaran bukan makanan menurun dari 46,43 persen pada tahun 2016 menjadi 44,53 persen di tahun 2017. Ini mengindikasikan pengeluaran makanan masih menjadi prioritas. Penurunan pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada semua jenis pengeluaran, kecuali pengeluaran lainnya yang justru mengalami peningkatan dari 8,45 persen meningkat menjadi 12,42 persen pada tahun 2017.

Untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digunakan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia, yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang mampu dibelanjakan oleh kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Disamping kriteria yang ditetapkan Bank Dunia ada indikator lain yang juga sering digunakan yaitu Indeks Rasio.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2015 sampai 2017 pada semua kelas penduduk yang berpendapatan rendah, sedang dan tinggi terlihat berfluktuatif. Kelas 40 persen penduduk berpendapatan paling rendah tercatat

20,58 persen pada tahun 2015 menurun menjadi 20,68 persen pada tahun 2016 dan terus menurun signifikan pada tahun 2017 menjadi 13,97 persen. Keadaan ini menggambarkan bahwa pada kelas 40 persen penduduk berpendapatan rendah membaik dengan tingkat ketimpangan pendapatan sedang. Sementara pada kelompok penduduk berpendapatan tinggi terlihat adanya kenaikan persentase yaitu dari 41,93 persen di tahun 2015 menjadi 43,33 persen pada tahun 2016 dan terus meningkat tajam menjadi 49,01 persen pada tahun 2017.

Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran untuk Makanan dan Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita (Rupiah) Kota Pariaman, 2015-2017

Golongan Pengeluaran	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
40 % Terendah	20,58	20,68	13,97
40 % Menengah	37,49	35,98	37,02
20 % Tertinggi	41,93	43,33	49,01
Indeks Gini	0,331	0,338	0,301

Sementara itu untuk koefisien indeks gini, tidak menunjukkan perubahan, meskipun pendapatan penduduk

cenderung naik turun, namun indeks gini tetap berada pada kisaran 0,33 di tahun 2015 dan 2016 , namun di tahun 2017 menurun menjadi 0,30 yang menunjukkan ketimpangan antar kelompok semakin kecil.

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

**Tabel 5.3 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari
Kota Pariaman, 2015-2017**

Golongan Pengeluaran	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)	1937,08	2068,68	2102,82
Protein (gram)	54,68	58,48	61,44

Sumber: Susenas 2015-2017

Rata-rata konsumsi kalori penduduk pada tahun 2017 sebanyak 2.102,82 kkal atau naik sebesar 34,14 kkal dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2068,8 kkal, hal ini berarti konsumsi kalori per hari penduduk sejak tahun 2016 sudah memenuhi syarat kecukupan gizi berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi. Seperti halnya konsumsi kalori, rata-rata konsumsi protein per kapita juga mengalami peningkatan meskipun relative kecil, yaitu dari 58,48 gram pada tahun 2016 menjadi 61,44 gram pada tahun 2017, yang berarti sudah menacapai ketentuan atau batas kecukupan gizi yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi.

<https://pariamankota.bps.go.id>

BAB VI

PERUMAHAN & LINGKUNGAN



Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m²

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Kualitas Rumah Tinggal

Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis atap, lantai dan dinding terluas yang digunakan, termasuk fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal tersebut.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Perumahan Kota Pariaman, 2016-2017

Indikator Perumahan (1)	Tahun	
	2016 (3)	2017 (3)
Lantai Bukan Tanah	100,00	99,53
Atap layak *)	100,00	99,55
Dinding Permanen **)	99,87	99,16
Luas lantai $\geq 10 \text{ m}^2$ perkapita	85,39	81,86

Sumber: Susenas, 2016-2017

* Atap Layak: Atap Seng, Beton, Geteng, Sirap, dan Asbes

** Dinding Permanen: Dinding Tembok dan Kayu

Berdasarkan Susenas 2016 dan 2017, persentase rumah tangga yang berlantaikan bukan tanah hampir mencapai 100 persen, artinya hampir tidak ditemukan rumah berlantaikan tanah di Kota Pariaman. Kondisi yang sama juga terjadi pada bangunan rumah tangga yang menggunakan atap terluas. Dari hasil Susenas 2017 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes juga sudah mencapai 100 persen yaitu hampir juga tidak ditemukan rumah dengan atap jerami/ijuk di Kota Pariaman. Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah dinding terluas. Rumah tinggal dengan dinding terluas tembok dan kayu di Kota Pariaman juga sudah mendekati 100 persen, atau rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas bambu tidak mencapai 1 persen.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang

tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian dan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001).

Berdasarkan hasil Susenas 2016-2017 persentase rumah tangga dengan luas lantai perkapita di atas 10 m² pada tahun 2016 mencapai 85,39 persen dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 81,86 persen.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup terutama untuk

keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2017 telah mencapai 81,00 persen. Gaya hidup penduduk dalam mengkonsumsi air minum juga telah banyak berubah. Dari tabel terlihat rumah tangga di Kota Pariaman yang mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan ledeng mencapai 54,24 persen di tahun 2016 dan ters meningkat menjadi 56,37 persen d tahun 2017.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan Kota Pariaman, 2016-2017

Fasilitas Perumahan (1)	Tahun	
	2016 (2)	2017 (3)
Air kemasan, air isi ulang dan ledeng	54,24	56,37
Air minum bersih	77,06	81,00
Jamban sendiri	82,66	90,46
Jamban sendiri dengan tangki septik	79,15	78,22
Sumber penerangan listrik	99,60	98,85

Sumber: Susenas 2016-2017

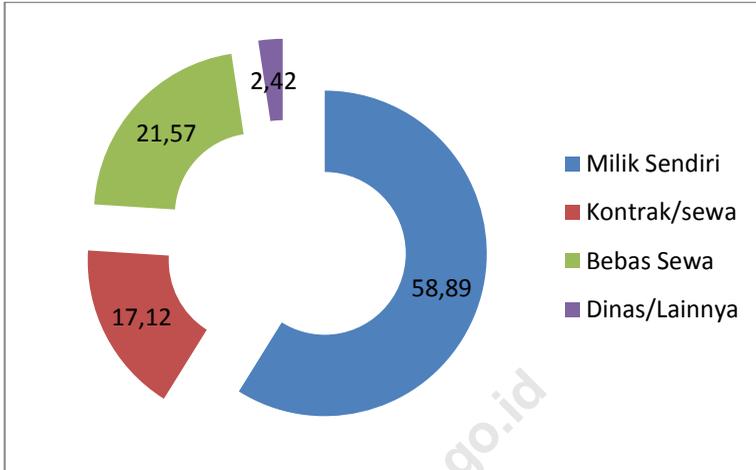
Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2017, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 78,22 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 (79,15 persen).

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Di Koa Pariaman rumah tangga yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik dalam dua tahun terakhir sudah

hampir mencapai 100 persen yaitu 99,60 persen di tahun 2016 dan 98,85 persen di tahun 2017.

Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.



Gambar 6.1 Status Kepemilikan Rumah (Persen) Kota Pariaman, Tahun 2017

Berdasarkan hasil Susenas 2017, rumah tangga di Kota Pariaman yang menempati rumah milik sendiri hanya sebesar 58,89 persen, kemudian sebanyak 21,57 persen adalah rumah bebas sewa. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik juga cukup besar di Kota Pariaman yaitu mencapai 17,12 persen. Hal ini dimungkinkan karena harga jual tanah di Kota Pariaman cukup tinggi, sehingga penduduk banyak yang mengontrak, sewa atau menempati rumah milik orang tua/saudara.

BAB 7 KEMISKINAN

kemiskinan didefinisikan menjadi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2015)



5,20 %

Persentase
Penduduk
Miskin



4,49 ribu jiwa

Jumlah
Penduduk
Miskin



Rp. 412.231

Garis
kemiskinan



0,59

Indeks
Kedalaman
Kemiskinan
(P1)



0,14

Indeks
Keparahan
kemiskinan
(P2)

KEMISKINAN

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan yang cenderung menurun secara melambat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Hal ini tergambar dari belum meratanya pembangunan antar daerah di Indonesia. Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan memang tidak dapat teratasi dengan mudah, karena kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mencakup sisi ekonomi, tetapi juga sisi sosial dan budaya. Saat ini pemerintah terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak dan tidak cukup hanya dari pemerintah, tetapi juga dari lembaga penelitian, sektor

swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (*Worldbank*).

Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Pariaman

Secara umum, persentase penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk Kota Pariaman menunjukkan tren di seputar angka 5 persen. Tingkat penurunan kemiskinan yang hanya mencapai 0,03 persen pada tahun 2017 adalah yang terkecil sepanjang periode empat tahun terakhir. Berdasarkan tabel 7.1, jumlah penduduk miskin bertambah dari 4,47 ribu di tahun 2016 menjadi 4,49 ribu di tahun 2017 walaupun sempat mengalami penurunan tahun 2016 dari tahun 2015. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi karena meningkatnya harga beberapa komoditas bahan pokok di pasaran dan naiknya harga bahan bakar minyak selama dua tahun terakhir.

**Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin Kota Pariaman
2014-2017**

Tahun	Jumlah penduduk miskin (Ribuan)	Persentase penduduk miskin (%)
2014	4,30	5,12
2015	4,58	5,42
2016	4,47	5,23
2017	4,49	5,20

Sumber: BPS Kota Pariaman

Suatu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah GK. Oleh karena itu, nilai GK berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada suatu waktu. Selama periode 2016-2017, Garis Kemiskinan Kota Pariaman mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2016 Rp 392.970,- menjadi Rp 412.231,- di tahun 2017.

**Tabel 7.2 Indikator Penduduk Miskin Kota Pariaman
2015-2017**

Indikator	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Garis Kemiskinan	395.965	392.970	412.231
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,58	0,90	0,59
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,09	0,22	0,14

Sumber: BPS Kota Pariaman

Selain GK, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan perlu diperhatikan. Ukuran untuk mengukur kesenjangan pengeluaran disebut sebagai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Berdasarkan tabel 7.2, nilai P1 mengalami penurunan pada tahun 2017, dari 0,90 pada tahun 2016 menjadi 0,59. Penurunan nilai P1 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Semakin kecil nilai P1 berdampak pada semakin mudah penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Ukuran lainnya untuk melihat kondisikemiskinan adalah Indeks KeparahanKemiskinan (P2). P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara

penduduk miskin. Selama 2016-2017, nilai P2 mengalami penurunan. Pada tahun 2017, nilai P2 menurun cukup signifikan dari tahun 2016, yaitu dari 0,22 menjadi 0,14. Semakin kecil nilai P2 mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin rendah.

<https://pariamankota.bps.go.id>

BAB 8

SOSIAL LAINNYA

Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan



Persentase Rumah Tangga yang Menguasai Telepon dan Komputer/Laptop



SOSIAL LAINNYA

Globalisasi telah mendorong perubahan pola hidup masyarakat. Teknologi yang semakin canggih membuat akses dunia tanpa batas. Begitu juga tingkat kebutuhan masyarakat yang mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier dulunya menjadi kebutuhan primer, seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak.

Perjalanan Wisata

Perjalanan wisata menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kemakmuran rakyat. Konsep perjalanan wisata diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor yaitu perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan tidak bertujuan untuk

sekolah, bekerja (memperoleh upah/gaji) di tempat yang dituju untuk mengunjungi obyek wisata komersial, dan atau menginap di usaha jasa akomodasi, dan atau jarak perjalanan pulang pergi sama atau lebih besar dari 100 km. Perjalanan wisata yang dimaksud bersifat perjalanan bukan rutin.

**Tabel 8.1 Indikator Sosial Lainnya Kota Pariaman,
Tahun 2016-2017**

Indikator	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan (bepergian)	29,54	38,41
Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan	0,56	1,37
Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha	20,84	37,44
Persentase Rumah Tangga Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KKP)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	14,34	10,00

Sumber: Susenas 2016-2017

Persentase penduduk yang melakukan perjalanan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 persentase penduduk yang melakukan perjalanan selama 6 bulan terakhir adalah

sekitar 29,54 persen, kemudian di tahun 2017 meningkat tajam menjadi 38,41 persen. Hal ini seiring dengan sarana transportasi darat, laut dan udara yang dapat dipergunakan telah memadai sampai wilayah terluar sekalipun.

Penerima Kredit Usaha

Kredit usaha pada umumnya diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bantuan modal dan pembiayaan bagi usaha produktif. Kredit usaha umumnya diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), modal ventura, Program Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), pegadaian, dan sebagainya. Dalam SUSENAS, kredit usaha bisa berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Bank selain KUR, KUBE/KUB, program koperasi, perorangan (dengan bunga), dan lainnya.

Tahun 2015, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha cukup besar yaitu 20,84 persen kemudian meningkat menjadi 37,44 persen di tahun 2017. Kredit usaha sangat bermanfaat terutama bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dalam menopang

perekenomian Kota Pariaman. Peningkatan persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha menggambarkan minat masyarakat semakin meningkat untuk memperoleh kredit usaha, terutama dari lembaga keuangan atau bank. Masyarakat cenderung memilih pinjaman di lembaga keuangan perorangan atau bank plecit karena persyaratan pengajuan yang lebih mudah dan cepat cair.

Tindak Kejahatan

Keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan rakyat. Rasa aman dari tindak kejahatan menjadi salah satu indikator pendukung yang mencerminkan rakyat sejahtera dan menjadi salah satu aspek penyusun Indeks Kebahagiaan Indonesia oleh BPS tahun 2014. Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan (BPS). Tindak kejahatan atau kriminalitas umumnya terjadi

sebagai akibat dari kesenjangan sosial dan ekonomi suatu negara, serta bisa bersumber dari faktor politik.

Tahun 2016, persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan di Kota Pariaman sebesar 0,5 persen. Angka ini meningkat menjadi 1,37 persen di tahun 2017. Jenis kejahatan yang dialami dapat berupa pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, perkosaan, dan lainnya.

Akses Pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Di era informasi saat ini, kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan akses Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong pergerakan sektor ekonomi. Tantangan pembangunan dari suatu negara besar adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur membantu konektivitas antar wilayah satu dengan wilayah lain secara cepat dan luas. Di samping pembangunan secara fisik, pembangunan jalur transportasi dan TIK juga penting sebagai salah satu infrastruktur konektivitas.

Kemajuan di bidang teknologi informasi memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Potensi TIK jika dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pembangunan nasional, TIK berperan serta menciptakan lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan kemampuan masyarakat. Semakin banyak penduduk yang memiliki akses TIK dan terus mengikuti kemajuan teknologi, maka dapat dipastikan kesejahteraan penduduk akan semakin meningkat.

Persentase rumah tangga yang mempunyai akses teknologi informasi dan komunikasi dengan alat komunikasi telepon selular, komputer, dan akses internet mengalami peningkatan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Persentase rumah tangga yang mempunyai komputer/laptop tahun 2017 sebesar 29,05 persen atau meningkat 2,06 persen dibanding tahun 2016 (26,99 persen).

Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi Menurut Alat Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman, 2016-2017

Alat Komunikasi dan Informasi	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Telepon	1,62	3,17
Telepon Selular	63,68	66,56
Komputer/laptop	26,99	29,05
Akses Internet	33,49	43,19

Sumber: Susenas 2016-2017

Persentase penduduk yang mengakses internet meningkat dari 33,49 persen di tahun 2016 menjadi 43,19 persen di tahun 2017. Persentase penduduk yang mempunyai akses telepon seluler tahun 2017 sebesar 66,56 persen atau meningkat 2,88 persen dibanding tahun 2016. Hal ini menggambarkan tingkat kebutuhan masyarakat saat ini terhadap telepon seluler semakin tinggi karena kemudahan mobilitas. Seiring perkembangan arus informasi yang mengalir deras, masyarakat juga semakin membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitasnya sehari-hari, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hiburan. Oleh sebab itu, para vendor telepon seluler berlomba-lomba menguasai

pangsa pasar dengan melihat antusiasme masyarakat yang cukup besar untuk memiliki telepon seluler yang sesuai dengan kebutuhannya.

<https://pariamankota.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA PARIAMAN

Jalan Sentot Ali Basa, Jati Hilir

Telp/Fax: 0751-93785

Email: bps1377@bps.go.id

Website: <http://pariamankota.bps.go.id>

ISBN 978-602-1390-65-8

